



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. MUHAMMAD MUSLIM
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 487984

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.590.000.000**

1. Tanah Seluas 15185 m2 di KAB / KOTA MARTAPURA, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 4462 m2 di KAB / KOTA BANJAR, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , WARISAN Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , WARISAN Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 813 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 7130 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
10. Tanah Seluas 242 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 427 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA



BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

413.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
285.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

23.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

1.091.723.276

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

4.117.723.276

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.117.723.276

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.